FITRA
Provinsi RIAU
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

Mendagri harus batalkan Anggaran Siluman di APBD Riau 2013

Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi sudah di sahkan bebrapa waktu yang lalu, namun pengesahan tersebut terkesan ada pemaksaan dari legislatif sebagai fungsi budgeting di DPRD. Selain terkesan pemaksaan ada pula beberapa hal yang menjadi tanda tanya besar bagi publik dan masyarakat luas, pasalnya ada isue yang kurang masuk akal dalam pengesahan dokumen anggaran publik tersebut. Betapa tidak, anggaran siluman yang ikut di sahkan oleh DPRD merupakan bukti ada kong kalikong antara DPRD Riau dan pemerintah provi nsi Riau serta pembahasan tersebut tidak di lakukan dengan cara yang benar karena ternyata anggaran-anggaran tersebut tidak di bahas pada komisi-komisi, terutama komisi C sebagai komisi yang membidangi masalah pembangunan di dinas PU. Padahal seminggu sebelum rapat paripurna pengesahan APBD Riau 2013 anggota DPRD rame-rame tidak akan mengesahkan anggaran-anggaran siluman tersebut. Dalam rapat paripurna itu juga ternyata anggaran yang seharusnya tidak menjadi kebutuhan publik justru ikut di sahkan, ini entah anggota dewannya yang kurang teliti atau memang ambisi pemerintah yang sengaja untuk membuang anggaran pada pos yang tidak bermanfaat bagi publik.? Adapun anggaran siluman yang di ikut di sahkan oleh anggota DPRD riau adalah sebagi berikut:

1. Pembangunan tugu PON sebesar Rp. 7,5 Milyar
2. Monumen bahasa Indonesia Rp. 16 Milyar
3. Pembangunan museum perempuan Rp. 10 Milyar
4. Penambahan anggaran jembatan siak IV sebesar 179 Milyar lebih, yang tentyunya nilai ini melibihi batas eskalasi dan telah melanggar Perpres No. 54 tahun 2010 dan Perpres No. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa.
5. Pembangunan Pagar stadion utama Riau Rp. 1,5 Milyar

Untuk itu kami dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru, dan Badan Ekskutif Mahasiswa Universitas Riau mendesak kepada mendagri melaluli Dijtjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian dalam Negeri di jakarta, Untuk membatalkan atau membahas ulang anggaran yang tidak bermanfaat bagi kepentingan masyrakat Riau. Seandainya permendagri tidak menyikapi permohonan keberatan ini kami akan menjukan judsial review di mahkamah Agung sebagai upaya evaluasi kebijakan politik anggaran yang tidak pro rakyat.

Fitra Riau : Usman

Created using
easyPDF Printer
Click here to purchase a license to remove this image